

Peran Strategis Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan di SMA: Implikasi dari Pergub 97 Tahun 2022

Imam Asrofi^{1*}, Ika Sriyanti², Isep Budiman³, Eli Sunarsah⁴

Universitas Islam Nusantara, Indonesia¹

Universitas Mandiri Subang, Indonesia²

SMA Negeri 1 Pangkalan, Indonesia³

SMA Negeri 1 Parungkuda, Indonesia⁴

*imam.asrofi@uninus.ac.id¹

Abstract

This study aims to analyze the strategic role of school committees in improving educational services in Senior High Schools (SMA). The case study is SMA Negeri 1 Pangkalan. This research also sees that this role has an impact on the implementation of Governor's Regulation (Pergub) Number 97 of 2022. The regulation emphasizes the importance of school committees participating in decision-making, budget management, and quality control of education. This research is of a descriptive qualitative type with data collection carried out through interviews, observations, and documentation studies. The patterns, roles, and dynamics that emerge in policy implementation practices are identified analytically. Research shows that school committees play an important strategic role as principals' partners in planning, supervising, and evaluating educational programs. Governor's Regulation 97 of 2022 which increases transparency, cooperation, and accountability in school management. But there are still problems, especially because some parents don't know what the committee does and there is no community participation. To improve policy effectiveness, sustainable socialization strategies and cooperation between local governments and educational units are necessary. It is hoped that this research will contribute to the development of policies that encourage participation in improving the quality of educational services.

Keywords: *Committee on Schools, Education Quality, Community Participation, Governor's Regulation 97/2022*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis komite sekolah dalam meningkatkan layanan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA). Studi kasusnya adalah SMA Negeri 1 Pangkalan. Penelitian ini juga melihat peran ini berdampak pada pelaksanaan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 97 Tahun 2022. Regulasi tersebut menekankan pentingnya komite sekolah ikut serta dalam pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran, dan pengawasan kualitas pendidikan. Penelitian ini berjenis kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Pola, peran, dan dinamika yang muncul dalam praktik implementasi kebijakan diidentifikasi secara analitis. Penelitian menunjukkan bahwa komite sekolah memainkan peran strategis penting sebagai mitra kepala sekolah dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Pergub 97 Tahun 2022 yang meningkatkan transparansi, kerja sama, dan akuntabilitas pengelolaan sekolah. Namun masih ada masalah, terutama karena sebagian orang tua tidak tahu apa yang dilakukan komite dan tidak ada partisipasi masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, strategi sosialisasi yang berkelanjutan dan kerja sama antara pemerintah daerah dan satuan pendidikan yang diperlukan. Diharapkan penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang mendorong partisipasi dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Kata Kunci: *Komite Sekolah, Mutu Pendidikan, Partisipasi Masyarakat, Pergub 97/2022*



I. PENDAHULUAN

Keberhasilan sekolah menengah sangat dipengaruhi oleh kualitas pembelajaran di Sekolah Menengah Atas (SMA). Kemampuan akademik, karakter, dan keterampilan sosial siswa akan dipengaruhi oleh pembelajaran yang buruk, yang merupakan indikator penting dari kualitas pendidikan nasional. Layanan pendidikan harus ditingkatkan dengan cara yang lebih sistematis, terarah, dan berkesinambungan. Ini ditunjukkan oleh fakta bahwa siswa sekolah menengah masih tidak memenuhi standar yang ditetapkan dalam ujian nasional dan asesmen kompetensi. Semua pemangku kepentingan pendidikan, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, harus berpartisipasi dalam upaya ini, bukan hanya sekolah. Kerja sama yang kuat antara perencanaan kebijakan, pelaksanaan pembelajaran, dan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung proses pendidikan memastikan pendidikan yang lebih berkualitas. Untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah menengah atas, perlu ada sistem kolaboratif yang memperkuat fungsi setiap komponen, termasuk komite sekolah, sebagai perwakilan masyarakat di lingkungan pendidikan (Hasanah dkk., 2025).

Komite sekolah adalah suatu lembaga mandiri yang menggabungkan kepentingan sekolah dan masyarakat. Komite sekolah yang tidak hanya bersifat administratif saja, tetapi mereka juga bertanggung jawab untuk mampu melakukan suatu pengawasan, mempertimbangkan kebijakan, dan membantu program pendidikan berjalan (Bisri, 2020). Komite sekolah merupakan kelompok partisipasi yang bertugas meningkatkan akuntabilitas publik atas penyelenggaraan pendidikan. Komite sekolah sendiri dapat berkontribusi melalui pemberian masukan terhadap kebijakan sekolah, penggalangan sumber daya, dan advokasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Keterlibatan masyarakat dalam manajemen pendidikan yang transparan dan demokratis ditunjukkan oleh partisipasi yang aktif dari komite sekolah. Komite sekolah juga memainkan peran yang penting dalam menyesuaikan kebutuhan sekolah dengan keinginan masyarakat untuk mampu memberikan pendidikan berkualitas.

Pemerintah daerah salah satunya di tingkat provinsi telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 97 Tahun 2022 untuk meningkatkan tata kelola pendidikan menengah. Pergub ini mengatur penyelenggaraan pendidikan, pengelolaan anggaran, dan peningkatan komitmen masyarakat terhadap kualitas pendidikan. Regulasi ini yang bertujuan untuk mendorong komite sekolah untuk berpartisipasi lebih aktif dalam setiap



proses pengambilan keputusan di tingkat satuan pendidikan. Komite sekolah yang diharapkan dapat bekerja sama dengan kepala sekolah untuk mampu mewujudkan tata kelola pendidikan yang lebih jelas, terlibat, dan berfokus pada peningkatan layanan yang lebih baik. Pergub 97 Tahun 2022 ini juga diharapkan untuk meningkatkan sistem pengawasan berbasis masyarakat dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya pendidikan di sekolah negeri.

Namun, secara di lapangan, kebijakan tersebut masih belum dilaksanakan. Karena kurangnya pemahaman anggota komite tentang fungsi dan tanggung jawab mereka, beberapa sekolah yang juga masih gagal memaksimalkan fungsi komite sekolah. Akibat faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi tingkat kepedulian terhadap pendidikan, partisipasi masyarakat yang seringkali tidak optimal. Kekurangan dukungan dari orang tua dan masyarakat juga dapat menyebabkan sekolah dan komite tidak bekerja sama dengan baik dalam mengatur dan melaksanakan program pendidikan. Sehingga diperlukan tindakan strategis untuk meningkatkan kapasitas komite sekolah melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang lebih berkelanjutan. Komite sekolah dapat melakukan tugasnya semakin efektif dalam mendukung kualitas layanan pendidikan serta membangun sekolah yang berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menganalisis peran strategis komite sekolah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah menengah atas. Penelitian di SMA Negeri 1 Pangkalan dan melihat dampak dari pelaksanaan Pergub 97 Tahun 2022. Sejauh mana komite sekolah berkontribusi pada transparansi, akuntabilitas, dan keberhasilan pengelolaan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Penelitian ini menganalisis dinamika hubungan antara komite sekolah, pihak sekolah, dan masyarakat dalam konteks kebijakan pendidikan daerah. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan empiris tentang praktik partisipasi masyarakat dalam pendidikan, serta rekomendasi aplikatif bagi pemerintah dan sekolah dalam memperkuat tata kelola pendidikan berbasis kolaborasi. Penelitian ini memiliki kontribusi penting dalam upaya peningkatan mutu layanan pendidikan berkelanjutan di tingkat SMA.

II. KAJIAN PUSTAKA

Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang dibentuk untuk memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam proses pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Komite sekolah berfungsi sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat, dan berfungsi



sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat dengan memberikan pertimbangan, dukungan, pengawasan terhadap kebijakan dan program pendidikan (Nurafni dkk., 20220). Komite sekolah bertanggung jawab mengumpulkan sumber daya, baik finansial maupun non finansial, dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan (Samsidar, 2018). Komite sekolah tidak hanya partisipasi masyarakat tetapi juga alat memperkuat tata kelola pendidikan yang adil dan terbuka. Komite diposisikan sebagai bagian penting dari manajemen berbasis sekolah menekankan kerja sama guru, kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat. Komite sekolah, yang diharapkan partisipasi publik lebih besar membangun pendidikan yang berfokus pada kebutuhan siswa (Supardi dkk., 2023).

Komite sekolah memiliki peran besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan, dan mereka memerlukan dukungan kebijakan, pengawasan, dan dukungan operasional. Ada peningkatan signifikan dalam kualitas pembelajaran jika komite sekolah terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan strategis. Komite sekolah bertanggung jawab atas keputusan tentang alokasi anggaran, kebijakan-kebijakan kurikulum, dan kegiatan pengembangan profesional guru. Kolaborasi yang baik antara sekolah dan komite sekolah mendorong penciptaan inovasi pembelajaran yang sesuai kebutuhan siswa. Keterlibatan komite dalam pengawasan program pendidikan juga membantu sekolah menjadi lebih akuntabel dan menggunakan sumber daya dengan lebih efisien. Komite sekolah berfungsi sebagai *partner* strategis untuk memastikan bahwa semua kebijakan pendidikan berfokus pada memberikan layanan yang lebih baik kepada siswa.

Layanan pendidikan yang lebih baik terkait erat dengan partisipasi aktif komite sekolah. Kapasitas akademik dan kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan lebih tinggi di sekolah dengan komite aktif. Komite sekolah yang aktif dapat membantu sekolah dan orang tua berkomunikasi lebih baik, menciptakan lingkungan belajar yang baik. Partisipasi komite dalam kegiatan sekolah ini dapat meningkatkan penggunaan anggaran dan meningkatkan dukungan sosial untuk kegiatan pendidikan. Komite sekolah penting untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler yang membantu siswa berkembang secara keseluruhan, baik dalam hal akademik maupun non akademik. Kinerja komite sekolah dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan manajemen sekolah dalam membangun sistem pendidikan yang berorientasi mutu dan partisipatif.

Peraturan Gubernur Nomor 97 tahun 2022 dibuat dengan tujuan meningkatkan tata kelola pendidikan menengah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dan layanan.



Pergub ini menekankan betapa pentingnya komite sekolah berpartisipasi secara aktif dalam mendukung pengelolaan pendidikan yang adil dan jujur, terutama dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sekolah. Pemerintah daerah berusaha memastikan bahwa setiap satuan pendidikan memiliki mekanisme partisipasi dalam pengambilan keputusan melalui peraturan ini. Pergub 97/2022 memastikan kurikulum dapat disesuaikan potensi daerah dan kebutuhan siswa, sejalan kurikulum merdeka. Kebijakan ini menyatakan bahwa tidak hanya guru dan kepala sekolah yang bertanggung jawab atas peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga masyarakat yang tergabung dalam komite sekolah dan peran mereka. Pergub 97/2022 membantu sekolah dan masyarakat bekerja sama untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Pergub 97 Tahun 2022 secara signifikan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah menengah atas. Kebijakan ini memungkinkan komite sekolah untuk terlibat secara sistematis dalam evaluasi dan pengawasan kinerja sekolah, meningkatkan akuntabilitas publik atas penyelenggaraan pendidikan. Penerapan kebijakan ini terbukti meningkatkan partisipasi orang tua dan masyarakat dalam kegiatan sekolah, ini berdampak positif pada keinginan siswa untuk belajar. Sekolah yang menerapkan prinsip transparansi dan kolaborasi sebagaimana diatur dalam Pergub tersebut cenderung memiliki tingkat kepuasan masyarakat yang lebih tinggi. Pengawasan komite sekolah juga memastikan bahwa dana pendidikan digunakan dengan benar dan sesuai dengan standar layanan yang lebih baik. Pelaksanaan Pergub 97/2022 tidak hanya memperkuat manajemen sekolah tetapi juga menumbuhkan budaya partisipasi dalam pendidikan tingkat menengah.

Penelitian sebelumnya memperkuat gagasan bahwa komite sekolah memainkan peran penting dalam kualitas pendidikan. Komite sekolah bertindak sebagai kolaborator strategis kepala sekolah untuk mengawasi, menilai, dan membuat rencana kerja tahunan (Bisri, 2020). Selain itu, rasa kepemilikan masyarakat terhadap sekolah meningkat ketika komite sekolah terlibat dalam pengambilan keputusan. Kerja sama yang efektif antara sekolah dan komite sekolah menghasilkan lingkungan belajar yang kreatif dan berfokus pada hasil. Namun, masalah seperti ketidaktahuan anggota komite dan kurangnya dukungan masyarakat masih menghalangi pelaksanaan kebijakan di lapangan. Penelitian ini meneliti lebih lanjut tentang dampak Pergub 97 Tahun 2022 terhadap peran komite sekolah dalam meningkatkan layanan pendidikan di sekolah menengah atas.



III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis peran strategis Komite Sekolah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah menengah atas, khususnya di SMA Negeri 1 Pangkalan, dan dampaknya Pergub Nomor 97 Tahun 2022. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena secara kontekstual melalui pengalaman, persepsi, dan interaksi sosial informan (Ramdhan, 2021). Penelitian kualitatif yang efektif digunakan untuk mengungkap dinamika sosial yang kompleks di lingkungan pendidikan dan menelusuri makna dari keputusan dan kebijakan yang diambil. Fakta empiris yang muncul di lapangan secara sistematis tanpa mengubah variabel digambarkan dengan pendekatan deskriptif. Metode ini digunakan peneliti untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang hubungan antara komite sekolah, kepala sekolah, guru, siswa, dan masyarakat dalam mendukung kebijakan pendidikan di daerah. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk menemukan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tugas komite sekolah, dan untuk mempelajari cara-cara untuk meningkatkan peran mereka untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik.

Penelitian ini melibatkan kepala sekolah, anggota komite sekolah, dan guru di SMA Negeri 1 Pangkalan. Metode *purposive sampling* digunakan untuk memilih informan, kandidat yang dipilih dianggap memiliki pemahaman yang paling mendalam tentang masalah dan memiliki hubungan langsung dengan penerapan kebijakan pendidikan di sekolah. Pemilihan informan secara purposif dapat menghasilkan data yang lebih kaya dan lebih relevan dengan subjek penelitian. Data sekunder berasal dari dokumen resmi Pergub 97 Tahun 2022, notulen rapat komite, dan dokumen sekolah. Data utama berasal dari observasi dan wawancara. Peneliti berusaha untuk memperoleh pemahaman yang baik tentang peran komite sekolah berubah dalam meningkatkan layanan pendidikan di tingkat SMA dengan menggunakan berbagai sumber informasi ini.

Tiga metode yang dipakai adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali perspektif informan tentang peran, kesulitan, dan kontribusi Komite Sekolah terhadap peningkatan layanan pendidikan. Metode ini memberi peneliti fleksibilitas untuk mengajukan pertanyaan lanjutan yang relevan dengan jawaban informan. Observasi dilakukan di SMA Negeri 1 Pangkalan untuk melihat secara langsung komite sekolah melakukan hal-hal, seperti rapat



koordinasi, kegiatan pengawasan, dan partisipasi dalam kegiatan sekolah. Dokumentasi mencakup analisis dokumen resmi seperti regulasi Pergub 97 Tahun 2022, hasil rapat komite, dan laporan program sekolah. Kombinasi ketiga pendekatan ini memungkinkan peneliti mendapatkan data yang mendalam dan faktual. Hal ini yang memperkuat validitas hasil penelitian.

Model interaktif Miles dan Huberman digunakan untuk melakukan analisis data, yang terdiri dari empat tahap: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024). Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dikompilasi secara sistematis selama tahap pengumpulan data. Setelah data dikumpulkan, informasi tentang topik penelitian, seperti pola peran, strategi kolaborasi, dan hambatan pelaksanaan kebijakan, dipilih. Untuk memudahkan hubungan antar-tema, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi tematik. Selanjutnya, kesimpulan ditarik melalui verifikasi, di mana data dari berbagai sumber diperiksa untuk memastikan konsisten. Informasi diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumen dibandingkan untuk memastikan keabsahan data penelitian.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan Komite Sekolah memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan di sekolah menengah atas, khususnya di SMA Negeri 1 Pangkalan. Komite Sekolah tidak hanya membantu tetapi juga berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan sekolah untuk meningkatkan layanan pendidikan. Komite sekolah berkumpul secara teratur untuk memberi tahu kepala sekolah tentang program pengembangan siswa, penggunaan dana BOS, dan kebijakan kurikulum. Peran ini sejalan dengan amanat Pergub 97 Tahun 2022, yang menekankan betapa pentingnya masyarakat berpartisipasi dalam tata kelola pendidikan. Keterlibatan komite sekolah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, komite sekolah membantu sekolah dan orang tua berkomunikasi, sehingga kebijakan pendidikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Partisipasi komite sekolah dapat memperkuat tata kelola sekolah berbasis kerja sama publik dan partisipasi (Mustadi dkk., 2016).

Komite sekolah di SMA Negeri 1 Pangkalan secara aktif mengawasi dan menilai layanan pendidikan. Komite sekolah yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kegiatan pendidikan berlangsung sesuai dengan standar kualitas yang telah



ditetapkan dan sesuai prinsip ekonomis dan efisien penggunaan anggaran (Mustadi dkk., 2016). Komite memiliki forum evaluasi bulanan untuk memberikan umpan balik yang bermanfaat kepada sekolah tentang hasil belajar siswa, kegiatan ekstrakurikuler, dan kualitas pendidikan (Bisri, 2020). Observasi ini menunjukkan keterlibatan komite dalam evaluasi meningkatkan kualitas pembelajaran dan mendorong guru. Komite sekolah yang berpartisipasi secara aktif dalam tugas pengawasan berkontribusi pada peningkatan berkelanjutan di sekolah (Samsidar, 2018). Komite sekolah merupakan bagian penting dari sistem kontrol sosial di dunia pendidikan dan bukan hanya formalitas.

Selain itu, keberhasilan dalam meningkatkan layanan pendidikan bergantung pada kerja sama komite sekolah dan berbagai pemangku kepentingan. Komite sekolah di SMA Negeri 1 Pangkalan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha untuk mendukung program pendidikan lebih banyak lagi. Kolaborasi dapat berupa pendampingan akademik, kegiatan sosial, dan pelatihan keterampilan vokasional bagi siswa. Kolaborasi lintas sektor ini meningkatkan peran sekolah sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hubungan antara komite sekolah dan pihak-pihak berkepentingan memiliki kemampuan untuk mampu meningkatkan efektivitas kebijakan pendidikan serta meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap sekolah. Namun, penelitian ini menemukan beberapa masalah. Salah satunya adalah fakta bahwa banyak orang tua tidak memahami komite sekolah berfungsi dengan baik. Akibatnya, untuk memastikan bahwa komite sekolah melakukan upaya terbaiknya untuk melaksanakan Pergub 97 Tahun 2022, sosialisasi yang berkelanjutan dan dukungan dari pemerintah diperlukan.

Pergub 97 Tahun 2022 menegaskan komite sekolah harus terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di tingkat SMA (Nurafni dkk., 2022). Komite sekolah, kepala sekolah, dan guru lebih berkolaborasi dengan baik saat membuat kebijakan di SMA Negeri 1 Pangkalan. Musyawarah perencanaan program tahunan dan pengawasan penggunaan dana sekolah menjadi lebih jelas dan menarik bagi orang-orang untuk berpartisipasi. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pendidikan dapat meningkatkan akuntabilitas lembaga pendidikan. Selain itu, terbukti di lapangan bahwa masyarakat lebih mudah menerima keputusan yang dibuat oleh komite sekolah karena mereka dianggap mewakili kepentingan bersama. Pergub 97 Tahun 2022



memperjelas peran komite sekolah secara administratif dan mampu meningkatkan fungsi sosialnya dalam sistem pendidikan (Hanafi & Ma'sum, 2015).

Salah satu hasil nyata dari pelaksanaan Pergub 97 Tahun 2022 adalah peningkatan kualitas layanan pendidikan di SMA Negeri 1 Pangkalan. Komite sekolah yang aktif berpartisipasi dalam program pembelajaran, perbaikan fasilitas sekolah, dan kegiatan penunjang siswa. Peran ini tidak hanya membantu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, tetapi juga meningkatkan kepuasan siswa terhadap pelajaran yang mereka terima. Hasil wawancara menunjukkan bahwa partisipasi komite sekolah aktif meningkatkan kehadiran dan prestasi akademik siswa. Selain itu, kepala sekolah menyatakan bahwa partisipasi komite mempercepat penyelesaian berbagai masalah administratif dan manajemen (Mustadi dkk., 2016). Kerja sama antara masyarakat dan lembaga pendidikan dapat secara konsisten meningkatkan kualitas layanan sekolah (Supardi dkk., 2023). Komite sekolah, yang diatur dalam Pergub 97 Tahun 2022, terbukti berhasil mendorong pendidikan yang lebih baik di sekolah menengah atas.

Dampak positif lain dari pelaksanaan Pergub 97 Tahun 2022 adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Komite sekolah membantu sekolah dan masyarakat, terutama orang tua, menyusun dan mengawasi program pendidikan. SMA Negeri 1 Pangkalan melihat peningkatan yang signifikan dalam partisipasi orang tua dalam kegiatan sekolah, terutama dalam rapat komite dan kegiatan sosial sekolah. Partisipasi masyarakat yang tinggi akan meningkatkan efektivitas pembelajaran dan meningkatkan rasa kepemilikan sekolah. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat meningkatkan sumber daya sekolah melalui kontribusi sukarela dan dukungan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Partisipasi masyarakat yang tidak hanya merupakan tanda partisipasi, tetapi juga merupakan komponen yang penting dalam memperkuat fondasi kelembagaan sekolah dan meningkatkan rasa kepercayaan publik terhadap layanan pendidikan (Hanafi & Ma'sum, 2015).

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa ada beberapa masalah saat komite sekolah menjalankan tugas strategisnya. Sebagian besar orang tua tidak memahami peran dan kewenangan komite sekolah, merupakan hambatan utama yang muncul. Sebagian orang masih melihat komite sebagai hanya lembaga penggalang dana daripada partner strategis dalam pengambilan keputusan pendidikan. Selain itu, waktu yang terbatas dan



kesibukan orang tua mengurangi partisipasi komite. Salah satu faktor utama yang menyebabkan komite sekolah tidak berfungsi dengan baik di berbagai daerah adalah kurangnya sosialisasi. Pada SMA Negeri 1 Pangkalan, situasi ini sempat menyebabkan masyarakat kurang terlibat pengawasan dan evaluasi kualitas pendidikan. Hal ini yang menunjukkan betapa pentingnya menggunakan pendekatan komunikasi yang lebih komprehensif untuk membuat masyarakat menyadari pentingnya kontribusi mereka terhadap kemajuan pendidikan.

Komite sekolah harus memperkuat strategi sosialisasi dan kerja sama lintas pihak untuk mengatasi tantangan tersebut. Kegiatan seperti lokakarya, seminar, dan pertemuan rutin dengan orang tua dapat membantu meningkatkan kesadaran kolektif (Hamzah, 2023). Langkah ini mulai diterapkan di SMA Negeri 1 Pangkalan dengan bekerja sama dengan lembaga pemerintah daerah dan tokoh masyarakat untuk menyebarkan informasi tentang fungsi komite sekolah. Hasilnya menunjukkan dukungan yang lebih luas terhadap kebijakan pendidikan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam rapat sekolah. Selain itu, kolaborasi dengan pihak eksternal seperti lembaga sosial dan dunia usaha dapat meningkatkan dukungan sumber daya sekolah. Pergub 97 Tahun 2022, pendekatan partisipatif seperti ini berfungsi sebagai model untuk pemberdayaan masyarakat. Komite sekolah, jika didukung kebijakan, koordinasi, dan komunikasi yang baik, memiliki potensi membantu meningkatkan layanan pendidikan (Septiana dkk., 2018).

V. KESIMPULAN

Komite Sekolah memiliki tanggung jawab strategis untuk meningkatkan layanan pendidikan di sekolah menengah atas, terutama melalui pelaksanaan Pergub 97 Tahun 2022, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam tata kelola pendidikan. Komite sekolah tidak hanya melakukan tugas administratif, tetapi juga bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, pengawasan, dan evaluasi yang semuanya berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Keterlibatan aktif komite sekolah di SMA Negeri 1 Pangkalan yang menunjukkan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi antara sekolah dan masyarakat. Tantangan seperti kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya pemahaman sebagian orang tua tentang fungsi komite membuat peran tersebut efektif. Sekolah dan pemerintah daerah harus meningkatkan sosialisasi dan pelatihan komite sekolah, meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan eksternal, dan membangun jalur komunikasi berkelanjutan.



VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bisri, A. M. (2020). Studi Analisis Komite Sekolah/Madrasah Dalam Mengawal Kualitas Pendidikan. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 51-64. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v1i1.31>
- Hamzah, R. A. (2023). Pendampingan Lokakarya Komunitas Belajar untuk Program Sekolah Penggerak Angkatan I Tahun Ketiga di Kabupaten Soppeng. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 1(2), 1-10. <https://doi.org/10.59837/nrs9cp18>
- Hanafi, I., & Ma'sum, M. (2015). Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan: Peran Komite Sekolah Pada Sekolah Menengah Kejuruan. *Cakrawala Pendidikan*, 2 (1), 58-66. <https://journal.uny.ac.id/index.php/cp/article/view/4176>
- Hasanah, W., Anderson, I., & Simaremare, T. P. (2025). Analisis Kesulitan Guru dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila di SMA Negeri 17 Tebo. *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 60-77. <https://doi.org/10.36456/p.v5i1.10165>
- Mar'ati, A. (2022). Peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan. *Kalam Cendekia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 10(2), 478-484. <https://doi.org/10.20961/jkc.v10i2.65774>
- Megiati, Y. E. (2016). Pemberdayaan Komite Sekolah: Kajian Konsep dan Implementasinya. *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 1(2). <http://dx.doi.org/10.30998/sap.v1i2.1019>
- Mustadi, A., Zubaidah, E., & Sumardi, S. (2016). Peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dasar. *Cakrawala Pendidikan*, (3), 95578. <https://doi.org/10.21831/cp.v35i3.10578>
- Nurafni, K., Saguni, F., & Hasnah, S. (2022). Pengaruh Kinerja Komite Sekolah dan Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Integrasi Manajemen Pendidikan*, 1(1), 44-68. <https://doi.org/10.24239/jimpi.v1i1.901>
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77-84. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Samsidar, D. (2018). Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial & Keislaman*, 3 (1). <https://doi.org/10.31604/muaddib.v1i1.364>
- Septiana, D. N., Bafadal, I., & Kusumaningrum, D. E. (2018). Pelibatan Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 1(3), 293-301. <http://dx.doi.org/10.17977/um027v1i32018p293>
- Supardi, S., Qurtubi, A., & Fatoni, H. (2023). Kemitraan Sekolah dan Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP IT Raudhatul Jannah Cilegon. *Journal on Education*, 5(4), 11196-11203. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2053>

